

IMPLEMENTASI PROGRAM DIKLAT DASAR PENDIDIK PAUD DI DINAS PENDIDIKAN KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2016

IMPLEMENTATION OF BASIC TRAINING FOR PAUD EDUCATORS AT DINAS PENDIDIKAN KOTA YOGYAKARTA IN 2016

Oleh: Lailatis Sa'adah (12110241042), Jurusan Filsafat dan Sosiologi Pendidikan,
Kebijakan Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta,
lailatis.saadah@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan : 1) Implementasi program diklat dasar pendidik PAUD di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta tahun 2016; 2) faktor yang mempengaruhi implementasi program diklat dasar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Subjek penelitian terdiri atas kepala bidang pendidikan non formal, kepala seksi PAUD, panitia penyelenggara diklat dasar, dan peserta. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan 3 tahapan analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Program diklat dasar pendidik PAUD di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta tahun 2016 telah diimplementasikan. Hal ini dapat terlihat dari beberapa tahapan implementasi yang dilakukan yaitu : a) persiapan; b) monitoring; c) penentuan kriteria keberhasilan; d) pelaporan . 2) Faktor yang mempengaruhi implementasi diklat adalah faktor pendukung dan faktor penghambat yaitu a) faktor pendukung : motivasi peserta, tersedianya dana dan fasilitas; b) faktor penghambat : masalah tempat dan komitmen peserta.

Kata kunci : implementasi, program diklat dasar pendidik PAUD

Abstract

This research aims to describe about : (1) implementation of basic training of PAUD educators at Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta in 2016; (2) factor that influence the implementation of basic training programs. This research uses descriptive qualitative approach. The subject of this research consist of non formal education department head, the head of PAUD section, the committee of the basic training, and participants. The data analysis used is observation, interview, and documentation. This research used three ways of analysis such as data reduction, data report, and conclusion result. Test of validity data used triangulation sources. The result of the research shows that : 1) basic training of PAUD educators at Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta in 2016 has implemented. It can happen because of some steps such as : a) preparing; b) monitoring; c) determining of success criteria; d) reporting. 2) Factor that influences is pushes factor and hampers factor. a) factor that pushes basic training program is :

motivation of the participants, the facilities and the funds are available; b) factor that hampers basic training is : problem of place and commitment of the participants.

Keywords : implementation, basic training of PAUD educators

PENDAHULUAN

Proses pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terdiri atas beberapa komponen yang saling mempengaruhi satu sama lain. Komponen pada proses pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan antarlain adalah (1) Anak yang berperan sebagai subjek sentral dalam mengembangkan potensi yang dimiliki atau dapat pula dikatakan sebagai peserta didik, (2) lembaga-lembaga atau instansi pemerintah yang menetapkan kebijakan, program. Sumber daya (SDM, Material, Dana), (3) orangtua, masyarakat, LSM, organisasi dan media massa sebagai penunjang penyelenggaraan PAUD. (Dr.Yuliani Nurani Sujiono, 2011 : 21).

Pendidik PAUD merupakan salah satu komponen yang memiliki peran aktif dalam pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini, hal ini dikarenakan pendidik berperan

sebagai pihak yang melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan peserta didik dalam suatu lembaga PAUD. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa guru PAUD harus memiliki kompetensi pendidik atau Guru pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) memiliki kualifikasi akademik sekurang-kurangnya Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S-1) di bidang Pendidikan Anak Usia Dini (S-1/ D-IV PG-PAUD), kependidikan lain, atau psikologi, dan memiliki sertifikasi profesi guru PAUD atau sekurang-kurangnya telah mendapat pelatihan pendidikan anak usia dini.

Diklat Dasar Pendidik PAUD merupakan bagian dari salah satu diklat berjenjang yang diamanatkan oleh Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal (Dit.PPTK PAUDNI). Sebagaimana diketahui dasar

pelaksanaan diklat pendidik PAUD adalah Permendiknas No. 16 tahun 2007 tentang standar PAUD dan Permendiknas No.58 tahun 2009 tentang kompetensi dan kualifikasi akademik pendidik PAUD.

George C. Edwards III dan Ira Sharkansky dalam Suwitri (2008: 9) juga menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang dapat ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan atau dalam *policy statement* yang berbentuk pidato-pidato dan wacana yang diungkapkan pejabat politik dan pejabat pemerintah yang segera ditindaklanjuti dengan program-program dan tindakan pemerintah. Easton dalam Tangkilisan (2003:2) mendefinisikan kebijakan publik sebagai pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat. Sehingga cukup pemerintah yang dapat melakukan sesuatu tindakan kepada masyarakat dan tindakan tersebut merupakan bentuk dan sesuatu yang dipilih oleh pemerintah

yang merupakan bentuk dan pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat. Tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn sebagaimana dikutip dalam Budi Winarno (2007:32-34) adalah sebagai berikut : 1) tahap penyusunan agenda, 2) tahap formulasi kebijakan, 3) tahap adopsi kebijakan, 4) tahap implementasi, 5) tahap evaluasi kebijakan. Kebijakan publik dapat dikategorikan kedalam beberapa jenis yang dapat disebut juga sebagai jenis kebijakan (James Anderson; 1979: 126- 132), yaitu: 1) Kebijakan substantif, 2) Kebijakan prosedural, 3) Kebijakan distributif, 4) Kebijakan regulatori, 5) Kebijakan re-distributif, 6) Kebijakan material, 7) Kebijakan simbolis, 8) Kebijakan yang berhubungan dengan barang umum, 9) Kebijakan yang berhubungan dengan barang privat.

Implementasi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh individu, kelompok, lembaga, maupun instansi tertentu dimana kegiatan tersebut menjabarkan berbagai rencana yang telah disusun agar rencana tersebut dapat

dilaksanakan dan mencapai tujuan yang ingin dicapai. Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2007:146) juga menjelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah ataupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan tersebut dilakukan untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu serta melanjutkan usaha-usaha tersebut untuk mencapai perubahan-perubahan besar ataupun kecil yang telah ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Jadi, menurut Van Metter dan Van Horn implementasi merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai keputusan kebijakan yang telah direncanakan. Sebelum membuat kebijakan, pemerintah harus mengkaji dampak apa saja yang ditimbulkan dari suatu kebijakan. Dampak yang dimaksud berupa dampak positif dan dampak negatif agar kebijakan yang

dilaksanakan tidak menimbulkan pertentangan dan kerugian bagi sasaran kebijakan. Charles O.Jones dalam Harahap (2004:15) menyatakan bahwa Implementasi adalah suatu proses interaktif antara suatu perangkat tujuan dengan tindakan atau bersifat interaktif dengan kegiatan-kegiatan kebijaksanaan yang mendahuluinya, dengan kata lain implementasi merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program dengan pilar-pilar organisasi, interpretasi, dan pelaksanaan. Model Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn dalam Solichin (2008:71) atau yang sering dikenal dengan istilah *The top down approach* menjelaskan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui.

Menurut Van Metter dan Van Horn dalam Agustino (2012:141) mengungkapkan bahwa ada 6 variabel yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik :

- 1) Ukuran dan tujuan kebijakan,
- 2) Sumber daya,
- 3) Karakteristik agen pelaksana,
- 4)

Sikap/ kecenderungan para pelaksana,
5) Komunikasi, 6) Lingkungan.

Pendidikan dan pelatihan merupakan upaya untuk mengembangkan sumber daya manusia, terutama untuk mengembangkan kemampuan intelektual dan kepribadian manusia. Penggunaan istilah pendidikan istilah pendidikan dan pelatihan dalam suatu institusi atau organisasi biasanya disatukan menjadi diklat (pendidikan dan pelatihan). Soekidjo Notoatmodjo (2003:28) menjelaskan bahwa pendidikan dan pelatihan adalah merupakan upaya untuk mengembangkan sumber daya manusia, terutama untuk mengembangkan kemampuan intelektual dan kepribadian manusia. Penggunaan istilah pendidikan dan pelatihan dalam suatu institusi atau organisasi biasanya disatukan menjadi diklat (pendidikan dan pelatihan). Diadakannya pendidikan dan pelatihan tentunya mempunyai tujuan-tujuan tertentu, baik bagi peserta itu sendiri maupun bagi kepentingan organisasi, hal ini perlu diperhatikan karena tujuan-tujuan

tersebut sesungguhnya merupakan landasan penetapan metode pendidikan dan pelatihan mana yang akan dipakai, materi yang akan dibahas, pesertanya dan siapa saja tenaga pengajarnya untuk dapat memberi subjek yang bersangkutan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif pada intinya berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sedang terjadi. Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Bidang Pendidikan Non Formal Seksi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang beralamat di Jalan Hayam Wuruk Nomor 11, Kota Yogyakarta. Penelitian dilakukan mulai bulan Februari sampai dengan bulan April tahun 2016.

Subjek penelitian : Kepala Bidang Pendidikan Non Formal (KaBid PNF), Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini (KaSie PAUD), Panitia Penyelenggara Diklat

Dasar Pendidik PAUD, serta Pendidik PAUD yang mengikuti Diklat Dasar tahun 2016. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Tahapan yang dilakukan implementasi program diklat dasar pendidik PAUD tahun 2016 di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta adalah : a) Persiapan, b) Monitoring, c) Penentuan kriteria keberhasilan, d) Pelaporan.
2. Ukuran dan tujuan kebijakan, diklat dasar merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kompetensi pendidik PAUD. Diselenggarakannya diklat dasar bagi pendidik PAUD juga membantu pihak Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dalam menyeleksi calon penerima insentif menjadi lebih mudah. Materi-materi yang disampaikan oleh narasumber merupakan materi-materi yang berbasis

pengalaman dan kebutuhan pendidik PAUD dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran.

3. Sumber daya, aktor-aktor yang berperan dalam implementasi diklat dasar diantaranya yang paling utama adalah adanya kebijakan yang mengatur kompetensi, standar, dan kualifikasi pendidik PAUD yang kemudian ditindaklanjuti dengan pengimplementasian diklat dasar bagi pendidik PAUD. Selain itu, implementasi diklat dasar didukung juga oleh tersedianya dana yang bersumber dari APBD.
4. Karakteristik agen pelaksana, pihak-pihak yang berperan dalam implementasi program diklat dasar pendidik PAUD. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada hasil wawancara sebelumnya bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi program diklat dasar pendidik PAUD adalah : kebijakan Dit. PPTK PAUDNI, Instansi Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, Panitia penyelenggara, Peserta dan Narasumber yang hadir dari

beberapa komponen seperti BPKB, SKB, HIMPAUDI, maupun akademisi.

5. Sikap para pelaksana, sikap para pelaksana cenderung menerima implementasi program diklat dasar. Hal ini tercermin dari sikap narasumber, panitia, dan peserta yang telah melaksanakan peran masing-masing. Selain itu, implementasi program diklat dasar dapat terselenggara sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Apabila agen pelaksana tersebut menolak kebijakan peningkatan kompetensi dan kualifikasi pendidik PAUD, maka implementasi program diklat dasar pendidik PAUD tidak akan pernah terlaksana.
6. Komunikasi. Sosialisasi merupakan salah satu bentuk komunikasi yang terjalin antar pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi program diklat dasar pendidik PAUD di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.
7. Lingkungan. Lingkungan sosial menuntut pendidik PAUD untuk melakukan kegiatan pembelajaran yang berkualitas di lembaga.

Kemudian Dit.PPTK PAUDNI melalui Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta mengimplementasikan program diklat dasar sebagai bentuk fasilitasi terhadap peningkatan kompetensi dan kualifikasi pendidik PAUD. Sehingga bahwa implementasi program diklat dasar didukung oleh kebutuhan lingkungan dalam hal mutu pendidik PAUD. Selama implementasi program diklat dasar pendidik PAUD di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta tidak ditemui masalah yang muncul dari segi ekonomi, sosial, bahkan politik.

8. Faktor pendukung implementasi program adalah kesadaran para pendidik PAUD untuk mengikuti diklat dasar, tersedianya dana dan narasumber, serta tersedianya fasilitas penyelenggaraan diklat di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Pendidik PAUD termotivasi untuk mengikuti diklat dasar agar mampu mendidik sesuai dengan kriteria Permendiknas dan menyesuaikan karakter ataupun psikologis anak.

9. Faktor penghambat program adalah masalah tempat dimana tempat tersebut tersedia untuk ditempati selama diklat dasar berlangsung dan sulitnya menjaring peserta yang berkomitmen tinggi untuk mengikuti diklat dasar selama 8 hari karena peserta harus meninggalkan lembaga dan keluarga.

KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

1. Tahapan yang dilakukan implementasi program diklat dasar pendidik PAUD tahun 2016 di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta adalah : a) Persiapan, b) Monitoring, c) Penentuan kriteria keberhasilan, d) Pelaporan.
2. Variabel yang mempengaruhi implementasi program diklat dasar pendidik PAUD di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta diantaranya adalah : ukuran dan tujuan kebijakan, karakteristik agen pelaksana, sikap para pelaksana, sumber

daya, komunikasi, dan lingkungan.

3. Faktor pendukung implementasi adalah motivasi peserta yang tinggi untuk mengikuti diklat dasar, tersedianya dana dan fasilitas, tersedianya narasumber yang mampu menyampaikan materi dengan baik.
4. Faktor penghambat implementasi program diklat dasar pendidik PAUD adalah masalah kesediaan tempat selama 8 hari, komitmen peserta untuk mengikuti diklat sampai dengan selesai karena harus meninggalkan lembaga dan keluarga.

b. Saran

1. Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Program harus mempertahankan diklat dasar pendidik PAUD karena dapat dijadikan wahana bagi para pendidik PAUD yang belum mencapai standar kompetensi

- dan kualifikasi yang diatur dalam perundang-undangan.
2. Panitia penyelenggara sudah melakukan tugasnya dengan maksimal namun ada beberapa poin yang perlu dibenahi diantaranya adalah : panitia penyelenggara diklat dasar diharapkan lebih sering hadir di dalam ruangan diklat untuk memantau secara langsung aktivitas antara peserta dengan narasumber.
 3. Fasilitas penyelenggaraan diklat perlu lebih diperhatikan lagi seperti dalam hal *handout* materi serta tata ruang untuk melaksanakan materi teori dan materi praktek agar peserta lebih nyaman. Selain itu kedisiplinan waktu perlu diperhatikan agar sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
 4. Narasumber yang hadir sudah menyampaikan materi dengan baik dan diterima oleh peserta. Akan tetapi alangkah lebih baiknya apabila narasumber lebih memperhatikan jadwal pelaksanaan agar materi yang disampaikan tidak *overtimes*.
 5. Peserta diklat dasar hendaknya mematuhi segala aturan penyelenggaraan diklat dasar yang diantaranya adalah untuk datang tepat waktu, mengikuti semua kegiatan yang ada di diklat dasar, serta aktif pada saat narasumber menyampaikan materi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Charles O.Jones. (1996). *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta : Raja Grafindo
- [2] Dirjen PNFI. (2010). *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini*. Jakarta: Dirjen PAUD.
- [3] Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru

[4] Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini

[5] Joko Widodo. (2007). *Analisis Kebijakan Publik*. Malang : Bayumedia Publishing

[6] Soekidjo Notoatmodjo. (2003). *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Rineka Cipta

[7] Solichin Abdul Wahab. (1997). *Analisis Kebijaksanaan : dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.

[8] Dr. Yuliani Nurani Sujiono, M.Pd. (2011). *Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini*. Jakarta : Indeks

[9] Moekijat. (2006). *Sistem Diklat Terpadu*. Jakarta : Rajawali.

[10] Edy Sutrisno. (2011). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group

[11] Arif Rohman. (2014). *Kebijakan Pendidikan Analisis Dinamika Formulasi dan Implementasi*. Yogyakarta : Aswaja Pressindo